

IMPLEMENTASI PROGRAM SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS INDONESIA ONE-GREEN FINANCE FACILITY (SIO-GFF) OLEH PT SARANA MULTI INFRASTRUKTUR (PERSERO) PERIODE 2022 - 2024

Sagit Hartono Santoso dan Natasya Audria

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama)
natasyaandr@gmail.com, sagit.hartono@gmail.com

ABSTRACT

This research aims to analyze the implementation of the Sustainable Development Goals Indonesia One-Green Finance Facility (SIO-GFF) program as a form of effort to improve the Indonesian economy after COVID-19. The research method used is a descriptive research method with a qualitative approach, where data collection is carried out through book sources, journal articles, theses and also internet sites. This research uses Interdependence theory to explain how the SIO-GFF program is implemented and to explain the success of the program. The research results show that the SIO-GFF program can attract the attention of the public, both local and international financial institutions and the private sector.

Keywords: *Sustainable Development Goals Indonesia One-Green Finance Facility (SIO-GFF), and COVID-19.*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa implementasi program *Sustainable Development Goals Indonesia One-Green Finance Facility* (SIO-GFF) sebagai bentuk upaya perbaikan perekonomian Indonesia pasca COVID-19. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif, di mana pengumpulan data dilakukan melalui sumber buku, artikel jurnal, skripsi, thesis dan juga situs internet. Penelitian ini menggunakan teori *interdependence* untuk menjelaskan bagaimana implementasi dari program SIO-GFF serta menjelaskan keberhasilan dari program tersebut. Hasil penelitian memaparkan bahwa program SIO-GFF ini dapat memikat perhatian khalayak, baik itu lembaga keuangan lokal, internasional, maupun sektor swasta.

Kata kunci: *Sustainable Development Goals Indonesia One-Green Finance Facility (SIO-GFF) dan COVID-19.*

PENDAHULUAN

Virus Corona adalah kelompok virus yang dapat menyebabkan penyakit pada hewan ataupun manusia. Beberapa jenis virus Corona diketahui menyebabkan infeksi saluran nafas pada manusia mulai dari batuk pilek hingga yang lebih serius seperti *Middle East Respiratory Syndrome* (MERS) dan *Severe Acute Respiratory Syndrome* (SARS). Virus Corona yang baru ditemukan menyebabkan penyakit COVID-19. Virus

baru dan penyakit ini tidak dikenal sebelum mulainya wabah di Wuhan, Tiongkok, bulan Desember 2019. Namun pada sejak 2020 awal, COVID-19 ini menjadi sebuah pandemi yang terjadi di banyak negara di seluruh dunia (Home, 2023).

Wabah COVID-19 ini menyebabkan ratusan ribu kematian, penutupan perbatasan, penutupan perekonomian dan mendatangkan banyak kerugian berskala besar yang belum pernah terjadi sebelumnya. Hal ini tentunya

sudah membebani banyak pihak, mulai dari pemerintah, layanan kesehatan, perusahaan dan sebagainya, yang di mana tentunya hal ini akan mempengaruhi kesejahteraan negara dalam jangka pendek maupun jangka panjang (Harper et al., 2020).

Pandemi COVID-19 menimbulkan dampak luar biasa bagi perekonomian dunia dan negara-negara yang terdampak. Ancaman resesi pun sudah di depan mata. Bahkan, negara sekuat Singapura, Korea Selatan, Jepang, Amerika Serikat, Selandia Baru, Inggris dan Perancis pun sudah merasakan imbas dari pandemik COVID-19 ini. Hal ini juga dirasakan oleh Indonesia di mana dalam dua kuartal berturut-turut pertumbuhan ekonomi nasional mengalami kontraksi hingga -5,32%.

Untuk mencegah dan memutuskan laju penularan virus ini, beberapa negara terdampak melakukan upaya *lockdown*, karantina wilayah dan pembatasan sosial skala besar (PSBB). Sejumlah kegiatan diberhentikan, baik itu penerbangan, transportasi darat dan laut demi mencegah penularan virus.

Wabah COVID-19 ini memiliki dampak yang kurang bagus terhadap perekonomian Indonesia. Hal itu dapat dilihat pada perlambatan pertumbuhan ekonomi yang turun dari 5,02% di tahun 2019 menjadi 2,97% pada tahun 2020. Perlambatan pertumbuhan ekonomi tersebut juga diikuti dengan peningkatan jumlah pengangguran, yang menurut data Bank Dunia meningkat dari 5,28% pada tahun 2019 menjadi 7,07% pada tahun 2020 (Negara, n.d.). Untuk itu, pemerintah Indonesia perlu membuat kebijakan guna dapat mengurangi dampak pada perekonomian yang disebabkan oleh pandemi COVID-19 ini. Salah satu bentuk upaya tersebut adalah pembangunan infrastruktur.

Pembangunan infrastruktur dianggap sebagai faktor kunci dalam mendorong

pertumbuhan ekonomi dan menarik investor asing untuk produksi dan produktivitas yang berkelanjutan. Sebaliknya, tingkat infrastruktur yang tidak memadai menghambat pertumbuhan ekonomi, suatu situasi yang dialami oleh negara-negara berkembang. Hal ini mengharuskan pemerintah untuk berinvestasi pada infrastruktur yang dilengkapi dengan pendanaan eksternal (What Is Infrastructure Development | IGI Global, n.d.).

Selain itu, pembangunan infrastruktur juga berdampak terhadap pertumbuhan pendapatan agregat. Bagian lain dari literatur terkini juga telah mengkaji dampaknya terhadap ketimpangan pendapatan. Gagasan mendasarnya, dalam kondisi yang tepat pembangunan infrastruktur dapat memberikan dampak positif terhadap pendapatan dan kesejahteraan masyarakat miskin (Estache et al., 2002).

Pembangunan infrastruktur dipercaya dapat memberikan peran penting untuk memacu pertumbuhan ekonomi baik di tingkat nasional maupun daerah, serta mengurangi pengangguran, mengentaskan kemiskinan dan tentunya meningkatkan kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia berkomitmen untuk terus meningkatkan pembangunan infrastruktur, karena ketersediaan infrastruktur yang handal merupakan hal yang sangat penting untuk meningkatkan perekonomian dan pertumbuhan dana usaha (Pembangunan Infrastruktur Dorong Pertumbuhan Ekonomi, n.d.). Selain itu, pembangunan infrastruktur juga berperan penting dalam menyediakan mobilitas untuk pergerakan orang dan barang yang efisien, serta menyediakan aksesibilitas ke berbagai kegiatan komersial dan sosial (Ng et al., 2019).

Sementara itu, konsumsi pemerintah mengalami penurunan dari 3,25% menjadi 1,94% akibat pengurangan alokasi di bidang

infrastruktur pada tahun 2020 sedangkan anggaran kesehatan lebih ditingkatkan pemerintah sesuai dengan fokus pemerintah untuk penanggulangan pandemi di Indonesia.

Pada 16 Februari 2022, *Asian Development Bank* (ADB) telah menyetujui pinjaman sebesar \$150 juta atau senilai Rp 2,14 triliun (kurs Rp. 14.300/US\$) guna mendukung fasilitas yang memiliki peran penting dalam pemulihan perekonomian Indonesia yang berkelanjutan setelah pandemi yang disebabkan oleh COVID-19, termasuk melalui penargetan khusus proyek pasca COVID-19 dalam mendukung proyek infrastruktur yang hijau dan layak, agar dapat membantu Indonesia mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals* (SDGs) (ADB beri pinjaman Rp 2,1 T dukung infra hijau dan SDG's, n.d.).

Asian Development Bank atau yang biasa disebut Bank Pembangunan Asia (ADB) sebuah bank multilateral yang mendukung proyek-proyek di negara-negara berkembang, menciptakan dampak ekonomi pembangunan, yang disampaikan melalui operasi sektor publik dan swasta, layanan konsultasi dan dukungan pengetahuan. ADB berkomitmen untuk mencapai Asia dan Pasifik yang sejahtera, inklusif, berketahanan dan berkelanjutan, sekaligus mempertahankan upayanya untuk memberantas kemiskinan ekstrem. ADB membantu negara-negara anggota dengan memberikan pinjaman, bantuan teknis, hibah, dan investasi ekuitas untuk mendorong pembangunan sosial dan ekonomi. Pinjaman ini diberikan melalui fasilitas *Sustainable Development Goals Indonesia One-Green Finance Facility* (SIO-GFF). Melalui fasilitas ini, pinjaman yang diberikan oleh ADB akan digunakan setidaknya untuk 10 proyek, dengan minimal 70% dari pembiayaan tersebut mendukung infrastruktur hijau dan sisanya mendukung target SDGs (Bank, 2022). Fasilitas ini dipercaya dapat

meningkatkan pembangunan infrastruktur berkelanjutan dan mempercepat pemulihan ekonomi Indonesia dari pandemi COVID-19 dengan menghimpun modal dan menciptakan lapangan pekerjaan.

Pinjaman perantara keuangan negara ke Indonesia guna mendukung pencapaian pembangunan berkelanjutan (SDGs) melalui pembiayaan transisi yang inovatif. Mekanisme SIO-GFF akan menghubungkan penyediaan dana dengan sub-proyek yang jelas ramah lingkungan. Dirancang sebagai fasilitas pengurangan resiko, SIO-GFF bertujuan untuk memanfaatkan dana ADB dan pemerintah untuk mengkatalisasi berbagai dana ramah lingkungan dari sumber swasta, institusi, dan komersial dari waktu ke waktu (Ddgarcia, 2022). Kementerian Keuangan meneruskan pinjaman kepada pemerintah Indonesia ini kepada PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) atau PT SMI. Selain itu, ADB juga telah menyetujui bantuan teknis guna membantu memperkuat kemampuan PT SMI untuk menjalankan fasilitas SIO-GFF, dan memperluas layanan PT SMI agar dapat mendukung peminjam lainnya dan mengkatalisis pendataan swasta. Bantuan teknis tersebut didanai senilai US\$ 1,2 juta atau Rp 17,2 miliar dari Departemen Luar Negeri dan Perdagangan Australia dan US\$ 375.000 atau Rp 5,3 miliar dari Dana Khusus Kemitraan Pembangunan Sektor Keuangan Luxembourg.

PT SMI itu sendiri merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang seluruh modalnya dimiliki sepenuhnya oleh Negara Republik Indonesia di bawah Kementerian Keuangan yang dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 100/PMK.010/2009 tentang Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur dengan 8 (delapan) sektor operasional yang dapat dibiayai oleh PT SMI, yaitu jalan, jembatan, transportasi, minyak dan gas, telekomunikasi, pengelolaan sampah, listrik, irigasi, dan penyediaan air minum (Sekilas PT SMI, n.d.).

Sebagai katalis pembangunan infrastruktur nasional, PT SMI telah menciptakan banyak hal positif. PT SMI membantu pemerintah dalam percepatan pembangunan, yang tidak hanya menciptakan perekonomian namun juga dampak sosial dan lingkungan bagi masyarakat. Berkat pengakuan atas prestasi yang diraih sebelumnya, PT SMI terus mendapat kepercayaan dari pemegang saham untuk melaksanakan program strategis pemerintah.

Pada tahun 2022, PT SMI ditunjuk sebagai *Country Platform Manager* Mekanisme Transisi Energi untuk mengelola kerangka pendanaan dan transisi energi pembiayaan di negara tersebut. Selain itu, PT SMI juga mendapat perluasan mandat sebagai *Development Finance Institution* (DFI) dalam rangka mempercepat pemulihan ekonomi dan mengantisipasi dampak perubahan iklim. Oleh sebab itu, besar harapan bahwa PT SMI dapat membantu Indonesia dalam mengimplementasikan fasilitas SIO-GFF ini untuk pemulihan ekonomi pasca COVID-19 sebab pertumbuhan ekonomi merupakan hal yang penting sekaligus menjadi sumber kebingungan (Chenery & Srinivasan, 1991).

KERANGKA TEORI

Pinjaman Luar Negeri

Pinjaman luar negeri dilakukan karena penerimaan pemerintah yang berasal dari pajak maupun penerimaan lainnya tidak mencukupi untuk membiayai pengeluaran pemerintah, baik untuk pengeluaran publik maupun pengeluaran aparatur. Dengan demikian pinjaman menjadi salah satu faktor yang menentukan akan terjadinya kesinambungan fiskal dari suatu anggaran negara.

Dalam jangka pendek, utang luar negeri sangat membantu pemerintah Indonesia dalam upaya menutup defisit

anggaran pendapatan dan belanja negara, akibat pembiayaan pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan yang cukup besar. Dengan demikian, laju pertumbuhan ekonomi dapat dipacu sesuai dengan target yang telah ditetapkan sebelumnya. Tetapi dalam jangka panjang, ternyata utang luar negeri pemerintah dapat menimbulkan berbagai persoalan ekonomi di Indonesia. Pada masa krisis ekonomi, utang luar negeri Indonesia, termasuk utang luar negeri pemerintah, telah meningkat drastis dalam hitungan rupiah sehingga menyebabkan pemerintah Indonesia harus menambah utang luar negeri yang baru untuk membayar utang luar negeri yang lama yang telah jatuh tempo. Akumulasi utang luar negeri dan bunganya tersebut akan dibayar melalui APBN RI dengan cara mencicilnya pada tiap tahun anggaran. Hal ini menyebabkan berkurangnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat pada masa mendatang, sehingga jelas akan membebani masyarakat, khususnya para wajib pajak di Indonesia (Atmadja, 2000).

Badan Usaha Milik Negara (BUMN)

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan (UU No 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara). Keberadaan BUMN merupakan konsekuensi dari paham kesejahteraan negara yang dianut Indonesia. Karakteristik negara kesejahteraan adalah keikutsertaan pemerintah dalam seluruh sektor kehidupan masyarakat termasuk sektor perekonomian masyarakat. Melalui kepemilikan negara terhadap unit-unit usaha tertentu, peran BUMN dalam menghasilkan barang atau jasa yang bermutu tinggi dengan harga yang terjangkau serta mampu berkompetisi dalam persaingan bisnis secara global diharapkan dapat memberi manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemakmuran

rakyat dan peningkatan kesejahteraan rakyat (Sumiyati, 2013).

Dalam rangka mengoptimalkan peran dan mempertahankan keberadaannya dalam perkembangan ekonomi dunia yang semakin terbuka dan kompetitif, BUMN perlu menumbuhkan budaya korporasi dan profesionalisme antara lain melalui pembenahan, pengurusan dan pengawasan BUMN. Pengurusan dan pengawasan BUMN harus dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip tata-kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*) (Suhayati, 2016).

Pembangunan Infrastruktur

Pembangunan infrastruktur telah menjadi tema umum dalam berbagai bidang kebijakan perdebatan. Misalnya, terdapat bukti yang meyakinkan bahwa penyediaan infrastruktur yang memadai adalah elemen kunci dalam agenda perekonomian yang diperlukan agar liberalisasi perdagangan dapat mencapai tujuan tersebut. Tujuan yang dimaksudkan untuk realokasi sumber daya yang efisien dan pertumbuhan ekspor. Juga, sejumlah penelitian berpendapat bahwa akses umum terhadap layanan infrastruktur memainkan peran penting dalam hal ini membantu mengurangi ketimpangan pendapatan.

Dengan latar belakang ini, terdapat persepsi yang berkembang bahwa di banyak negara tekanan konsolidasi fiskal telah menyebabkan kompresi belanja infrastruktur publik, yang belum diimbangi oleh peningkatan partisipasi sektor swasta, sehingga mengakibatkan kurangnya penyediaan layanan infrastruktur berpotensi menimbulkan dampak buruk yang besar terhadap pertumbuhan dan kesenjangan (Calderón & Servén, 2004).

Yang menjadi latar belakang pembangunan infrastruktur di Indonesia adalah kondisi geografis Indonesia itu sendiri. Hal itu karena Indonesia menjadi

negara kepulauan yang luas. Untuk mendukung dan memobilisasi dalam peningkatan ekonomi tentunya dibutuhkan Pembangunan infrastruktur berkelanjutan. Pembangunan infrastruktur sangat penting bagi Indonesia, karena pembangunan di berbagai sektor memiliki efek yang signifikan terhadap pengembangan wilayah. Selain itu, pembangunan yang dilakukan bisa memberikan efek nilai tambah industri dan menciptakan lapangan kerja yang baru.

Ada beberapa tujuan yang ingin dicapai pemerintah dengan menegaskan pembangunan infrastruktur, seperti meningkatkan konektivitas, merangsang pertumbuhan ekonomi di berbagai wilayah di tanah air. Pembangunan infrastruktur yang ditegaskan ini menjadi wujud keadilan bagi rakyat Indonesia. Jadi, pembangunan infrastruktur yang ditegaskan pemerintah tidak hanya di Pulau Jawa saja, namun merata ke seluruh wilayah di Indonesia. Dengan infrastruktur yang baik, mobilitas barang bisa semakin mudah dan membuat harga bahan pokok produk atau barang menjadi lebih terjangkau.

METODE PENELITIAN

Dalam meneliti “Implementasi Program *Sustainable Development Goals One-Green Finance Facility* (SIO-GFF) oleh PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) Periode 2022-2024”, penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif untuk menganalisis dan menjelaskan penelitian dengan merumuskan masalah sebagai fokus penelitian. Lalu tujuan penelitian secara deskriptif untuk menjelaskan dan menjawab penelitian sebagai objek yang diteliti. Maka dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data berupa studi pustaka yang memperoleh data sekunder secara online dari pengumpulan data dan informasi melalui buku, skripsi, artikel jurnal, dan media cetak untuk mengumpulkan data

yang dianggap relevan untuk informasi yang akan ditulis oleh penulis. Setelah data dikumpulkan, data akan diolah menjadi sebuah kesimpulan yang dapat menjawab rumusan masalah penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis, perekonomian Indonesia pasca COVID-19 memiliki dampak yang sangat signifikan. Penulis dapat menyimpulkan bahwa pembangunan infrastruktur dipercaya sebagai kunci dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan menarik investor asing.

Dengan bekerja sama dengan pihak keuangan internasional, Indonesia dapat memanfaatkan pembangunan infrastruktur sebagai upaya dalam memacu pertumbuhan ekonomi baik di tingkat nasional maupun daerah. Hal tersebut diterapkan oleh PT SMI sebagai *special mission vehicle* Kementerian Keuangan, untuk mendukung Pengelola Proyek Kerja Sama (PJPK) baik di tingkat pusat maupun daerah dalam penyediaan fasilitas dan mendukung penyiapan proyek. Pada tingkat pengendalian transaksi proyek KPBU, implementasi fasilitas ini diawali dengan membantu dalam mempersiapkan pra-studi kelayakan dan mendukung transaksi hingga tutup buku atau *financial close*.

Negara-negara dengan infrastruktur maju menunjukkan komitmen mereka terhadap pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Hal ini dapat menarik investor asing yang mencari peluang investasi yang stabil dan berkelanjutan. Indonesia mempunyai kebutuhan yang sangat besar terhadap infrastruktur seperti jaringan transportasi (jalan, pelabuhan, bandara), energi (listrik, gas), air minum dan telekomunikasi. Selama beberapa dekade terakhir, pemerintah Indonesia telah menjadikan infrastruktur sebagai prioritas utama untuk mendukung

pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan sosial.

Begitu juga dengan Departemen Luar Negeri dan Perdagangan Australia dan Dana Khusus Kemitraan Pembangunan Sektor Keuangan Luxembourg memberikan bantuan teknis untuk pemulihan perekonomian Indonesia pasca COVID-19. Bantuan teknis ini bertujuan untuk memperkuat kapasitas Indonesia dalam mengelola dan membangun infrastruktur yang diperlukan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, bantuan teknis dari Australia dan Luxembourg diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pembangunan infrastruktur yang lebih baik di Indonesia.

Selain itu, PLTMH Titab merupakan salah satu proyek kerja sama Indonesia-Inggris dalam bidang energi terbarukan. Inggris memberikan dana hibah untuk proyek PLTMH Titab sebagai bentuk dukungan berupa kontribusi sebagian biaya konstruksi yang dibayarkan secara tunai untuk proyek kerjasama antara pemerintah dan dunia usaha (KPBU) yang sudah layak secara ekonomi tetapi belum layak secara finansial atau dengan kata lain *Viability Gap Financing* (VGF). Tentu saja niat Inggris memberikan hibah tersebut adalah untuk meningkatkan kelayakan finansial proyek tersebut dalam arti lain, manfaat VGF ini adalah untuk mengurangi biaya proyek yang harus ditanggung oleh PT SMI.

Hal ini tidak hanya membawa manfaat teknologi dan ekonomi, tetapi juga mempererat hubungan bilateral Indonesia, Australia, Luxembourg dan Inggris di bidang energi dan lingkungan. Secara keseluruhan proyek-proyek yang dibiayai juga merupakan contoh nyata bagaimana kerja sama internasional dapat memanfaatkan potensi lokal untuk meningkatkan kemandirian

energi, mendorong teknologi ramah lingkungan, dan memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat lokal. Dapat disimpulkan bahwa program SIO-GFF ini selain dapat membantu kesejahteraan masyarakat juga dapat menarik perhatian negara-negara lain maupun organisasi internasional untuk bekerja sama dalam mendorong pembangunan infrastruktur ramah lingkungan.

DAFTAR PUSTAKA

- ADB Beri Pinjaman Rp 2,1 T Dukung Infra Hijau dan SDG's. (n.d.). <https://ptsmi.co.id/adb-beri-pinjaman-rp-21-t-ke-ri-dukung-infrastruktur-hijau-dan-sdgs>
- Adminiif. (2023, June 22). The synergy of IIF and SMI supports the provision of clean water in Kepulauan Riau – IIF. <https://iif.co.id/en/press-release/the-synergy-of-iif-and-smi-supports-the-provision-of-clean-water-in-kepulauan-riau/>
- Atmadja, A. S. (2000). UTANG LUAR NEGERI PEMERINTAH INDONESIA : PERKEMBANGAN DAN DAMPAKNYA. UTANG LUAR NEGERI PEMERINTAH INDONESIA : PERKEMBANGAN DAN DAMPAKNYA, 2(1), 83–94. <http://jurnalakuntansi.petra.ac.id/index.php/aku/article/view/15669/15661>
- Bank, A. D. (2022, February 16). Pinjaman ADB \$150 Juta Dukung Pemulihan Hijau, Katalis bagi Pembiayaan Menuju SDG di Indonesia. Asian Development Bank. <https://www.adb.org/id/news/150-million-adb-loan-support-green-recovery-catalyze-financing-toward-sdgs-indonesia>
- Calderón, C., & Servén, L. (2004). The effects of infrastructure development on growth and income distribution. In World Bank policy research working paper. <https://doi.org/10.1596/1813-9450-3400>
- Chenery, H. B., & Srinivasan, T. N. (1991). Handbook of Development Economics, Volume 2. The Economic Journal, 101(406), 655. <https://doi.org/10.2307/2233580>
- Ddgarcia. (2022, March 16). Project Agreement for Loan 4172-INO: Sustainable Development Goals Indonesia One - Green Finance Facility (Phase 1). Asian Development Bank. <https://www.adb.org/projects/documents/ino-54152-001-pra>
- Estache, A., Foster, V., & Wodon, Q. (2002). Accounting for Poverty in Infrastructure Reform: Learning from Latin America's Experience. ULB Institutional Repository. <https://ideas.repec.org/p/ulb/ulbeco/2013-44108.html>
- Green infrastructure investment opportunities. (2022). <https://doi.org/10.22617/tcs220077-2>
- Green Infrastructure Investment Opportunity (GIIO) Indonesia: Green Recovery 2022 Report. (2022, March 17). Climate Bonds Initiative. https://www.climatebonds-net.translate.google.com/resources/reports/green-infrastructure-investment-opportunity-giio-indonesia-green-recovery-2022?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=id&_x_tr_hl=id&_x_tr_pto=s
- Harper, L., Kalfa, N., Beckers, G. M., Kaefer, M., Nieuwhof- Leppink, A., Fossum, M., Herbst, K., & Bägli, D. (2020). The impact of COVID-19 on research.

- Journal of Pediatric Urology, 16(5), 715–716.
<https://doi.org/10.1016/j.jpuro.2020.07.002>
- Lee, J. W. (2020). Green finance and sustainable development goals: the case of China. *The Journal of Asian Finance, Economics and Business*, 7(7), 577–586.
<https://doi.org/10.13106/jafeb.2020.v07.no7.577>
- Negara, D. J. K. (n.d.). Pandemi Covid-19 dan menurunnya perekonomian Indonesia.
<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/16064/Pandemi-Covid-19-Dan-Menurunnya-Perekonomian-Indonesia.html>
- Ng, C. P., Law, T. H., Jakarni, F. M., & Kulanthayan, S. (2019).
- Road infrastructure development and economic growth. *IOP Conference Series*, 512, 012045.
<https://doi.org/10.1088/1757-899x/512/1/012045>
- Pembangunan infrastruktur dorong pertumbuhan ekonomi. (n.d.). Kementerian PUPR.
<https://pu.go.id/berita/pembangunan-infrastruktur-dorong-pertumbuhan-ekonomi>
- Ralph. (2023, February 14). Overview: ASEAN Catalytic Green Finance Facility (ACGF). Asian Development Bank. <https://www.adb.org/what-we-do/funds/asean-catalytic-green-finance-facility/overview>
- Saputra, H. N., & Ulum, M. (2022, September 16). PLTMH Titab Pelopor Pembangkit Minihidro di Bali.
- Bisnis.com. <https://bali.bisnis.com/read/20220916/537/1578186/pltmh-titab-pelopor-pembangkit-minihidro-di-bali>
- pelopor-pembangkit-minihidro-di-bali Sekilas PT SMI. (n.d.).
<https://ptsmi.co.id/sekilas-pt-smi>
- Simamora, Dody Harianto. 2012. Analisis Pengaruh Sistem Eksitasi Pada Generator PLTM Karai 7. Skripsi. Universitas Pembangunan Panca Budi. Medan
- Suhayati, M. (2016). KAJIAN YURIDIS PRIVATISASI BADAN USAHA MILIK NEGARA MELALUI MEKANISME PENAWARAN UMUM (INITIAL PUBLIC OFFERING). *Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan Dan Kesejahteraan*, 2(1), 51–74.
<https://doi.org/10.22212/jnh.v2i1.189>
- Sumiyati, Y. (2013). Peranan BUMN dalam Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan untuk Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 20(3), 460–481.
<https://doi.org/10.20885/iustum.vol20.iss3.art7>
- Tata kelola perusahaan. (n.d.).
<https://ptsmi.co.id/tata-kelola-perusahaan>
- United Nations. (n.d.). What is renewable energy? | United Nations.
https://www.un.org/en/climatechange/what-is-renewable-energy?gad_source=1&gclid=Cj0KCQjw7ZO0BhDYARIsAFttkCjt3wAPZ4BEjyRD0zSbaGg3josNKdHKfvdE4jGG21Omc7-7rbzqV94aAlFXEALw_wcB
- Volz, U. (2018). Fostering green finance for sustainable development in Asia. *Social Science Research Network*.
<https://doi.org/10.2139/ssrn.3198680>

What is Infrastructure Development | IGI Global. (n.d.). <https://www.igi-global.com/dictionary/the-impact-of-infrastructure-on-growth-and-development/59129#:~:text=It%20involves%20improvement%20of%20the,%2C%20ICT%2C%20water%20and%20sanitation.>

Siregar, Yani Parasti. (2024). Funding Mechanism ADB SIO-GFF Periode 2022- 2024. (A. Natasya, Interviewer).